



RENCANA KERJA (RENJA)

BAPENDA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Bapenda untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 di Bapenda Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2024.

Kami berharap Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Purwakarta serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta, sehingga pembangunan di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Juli 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda	II-10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda	II-13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-14
2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat	II-31
BAB III Tujuan dan Sasaran Bapenda	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda	III-4
3.3 Program dan Kegiatan	III-5
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda	IV-1
BAB V Penutup	V-1





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);





4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia





- Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);





22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024; dan
27. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bapenda Kabupaten Purwakarta.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh Bapenda sehingga dapat mewujudkan sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2022 dan Capaian





Renstra Perangkat Daerahp

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: Tujuan dan Sasaran Bapenda

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda

BAB V : Penutup





BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) telah dilaksanakan.

Terkait dengan Kinerja Urusan Keuangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Seluruh Dokumen Perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2022 telah selesai dilaksanakan diantaranya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Tahun 2024 yang secara keseluruhan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, pelaksanaan Kinerja Bapenda Kabupaten Purwakarta ditunjang dengan Belanja Urusan Perangkat Daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 Bapenda Kabupaten Purwakarta menerima alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 32.753.204.524,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 Program, 9 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 95,03% dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp. 26.833.193.556,00 (81,93%), seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini:





Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan
di Bapenda Kabupaten Purwakarta s.d Bulan Desember 2022

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keuaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.655.300	14.242.700	85,51	100,00	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.122.700	7.246.000	47,91	100,00	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.373.600	63.315.000	89,97	100,00	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.967.383.514	17.518.615.103	83,55	100,00	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.449.600	59.050.000	97,68	100,00	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	89.270.000	8.400.000	9,41	100,00	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kualitas Laporan BMD	Jumlah Dokumen Laporan EMD SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen





No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	290.333.800	289.517.050	99,72	100,00	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen	47 Jenis	47 Jenis
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	427.956.000	417.854.800	97,64	100,00	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen	28 Jenis	28 Jenis
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	1.750.000	29,17	70,00	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen	1 Jenis	1 Jenis
-	Fasilitas Kunjungan Tamu	50.000.000	49.510.000	99,02	100,00	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	12 Bulan	10 Bulan
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.686.000	66.059.791	94,8	95,48	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	152 HOK	145 HOK
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72.798.000	72.785.050	99,98	100,00	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	12 Bulan	11 Bulan
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	290.333.800	289.517.050	99,72	100,00	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen	47 Jenis	47 Jenis
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	427.956.000	417.854.800	97,64	100,00	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen	28 Jenis	28 Jenis
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	1.750.000	29,17	70,00	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen	1 Jenis	1 Jenis
-	Fasilitas Kunjungan Tamu	50.000.000	49.510.000	99,02	100,00	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	12 Bulan	10 Bulan
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.686.000	66.059.791	94,8	95,40	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	152 HOK	145 HOK
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72.798.000	72.785.050	99,98	100,00	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	12 Bulan	11 Bulan





No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	49.339.500	49,34	100,00	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	12 Bulan	12 Bulan
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
-	Pengadaan Mebel	190.260.300	190.000.000	99,86	100,00	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Komponen	7 Jenis	7 Jenis
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	7.730.250	154,61	100,00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pelayanan Perkantoran	Jumlah Materai 10000	500 Lembar	500 Lembar
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	611.580.000	526.595.637	86,1	100,00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pelayanan Perkantoran	Jumlah Bulan	12 Bulan	12 Bulan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.159.227.360	1.120.216.063	96,63	100,00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pelayanan Perkantoran	Jumlah Bulan	12 Bulan	12 Bulan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000	17.409.200	63,31	100,00	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Roda 4	1 Unit	1 Unit
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.100.000	106.133.725	86,92	100,00	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Roda 2 Roda 4	28 Unit 20 Unit	32 Unit 14 Unit





No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.800.000	137.097.918	90,91	100,00	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Komponen	8 Jenis	7 Jenis
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.108.000	348.561.442	99,84	100,00	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung	1 Unit	1 Unit
9	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								
-	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	105.547.800	80.000.000	75,8	100,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kajian Akademis pengembangan kebutuhan peningkatan penerimaan pajak daerah	3 Bulan	3 Bulan
-	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	453.131.900	333.192.900	73,53	68,75	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kajian peningkatan harga pasar PBB Pengoptimisasian Potensi Pajak Daerah Penyusunan Kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	3 Bulan 12 Bulan 1 Peraturan	0 Bulan 11 Bulan 0 Peraturan
-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	274.998.250	251.381.120	91,41	100,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembinaan dan sosialisasi pajak daerah	250 Orang	750 Orang
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100.028.400	90.166.500	90,14	80,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Belanja Printer Cetak ID Card NPWD Terlaksananya Belanja Printer Epson L3310 Terlaksananya Cetak Roll Banner Terlaksananya Cetak Spanduk PBB dan Pajak Daerah Lainnya Terlaksananya Cetak Sticker Vinyl Pajak Daerah dan Leaflet Brosur PBB	1 Unit 2 Unit 150 Buah 50 Buah 250 Set	1 Unit 1 Unit 0 Buah 0 Buah 250 Set
-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	712.013.600	637.543.719	89,54	100,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ekstensifikasi Pajak MBLB Menggali Potensi Wajib Pajak Baru	12 Dokumen 8 Jenis Pajak	12 Dokumen 9 Jenis Pajak





No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.090.147.100	1.306.054.200	62,49	60,75	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemeliharaan Alat Monitoring Pajak Daerah 1 Aplikasi 0 Aplikasi Pemeliharaan Aplikasi BPHTB Online 1 Aplikasi 0 Aplikasi Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Dashboard Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi e-SPTPD 1 Aplikasi 2 Aplikasi Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Peta Digital Pajak Daerah non PBB dan BPHTB 1 Aplikasi 0 Aplikasi Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMPATDA 1 Aplikasi 0 Aplikasi Pemutakhiran data wajib pajak daerah non PBB dan BPHTB 1 Aplikasi 0 Aplikasi Pengadaan Aplikasi Sependu Digital Service 1 Aplikasi 2 Aplikasi Pengembangan Aplikasi Payment PAD Virtual Account 1 Aplikasi 2 Aplikasi Pengembangan Aplikasi Retribusi	55 Unit	0 Unit
							Pengembangan Application Program Interface (API) Pajak Daerah Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan BPHTB Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan e-PBB Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan PBB Perakaman data objek dan subjek Pajak PBB P2		
-	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	324.999.900	271.763.000	83,52	100,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Berapa jumlah Pendataan dan Penilaian Subjek dan Objek Pajak PBB P2 Berapa jumlah Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan Permasalahan PBB P2 dan BPHTB	450 Wajib Pajak 150 Permasalahan	406 Wajib Pajak 131 Permasalahan
-	Penetapan Wajib Pajak Daerah	138.538.750	129.489.250	93,47	100,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pencetakan Masal SPPT dan DHKP PBB	452600 NOP	452600 NOP





No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	621.634.850	551.371.750	88,7	100,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani berapa orang Jumlah Wajib Pajak yang Konsultasi berapa orang	12000 Orang 600 Orang	12000 Orang 600 Orang
-	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	54.822.400	8.044.000	14,67	97,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan Pajak Daerah Non PEB dan BPHTB	12 Bulan	12 Bulan
-	Penagihan Pajak Daerah	1.675.499.600	1.115.505.338	66,64	100,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengamanan, pengendalian dan pengawasan peningkatan penerimaan pajak daerah Pengendalian dan Pengawasan Penyebaran SKPD	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan
-	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	374.994.250	221.272.000	59,01	92,60	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyelesaian keberatan pajak daerah	500 Dokumen	463 Dokumen
-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	449.968.050	249.790.900	55,51	100,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Evaluasi dan pelaporan Pendapatan Daerah Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pengendalian Potensi Pajak Daerah Lainnya (Uji Petik)	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
-	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	124.993.600	116.571.850	93,25	66,60	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	8 Bulan
TOTAL		32.753.204.524	26.833.193.556	81,93	95,83				

Sumber: LAKIP Bapenda Kab. Purwakarta Tahun 2022

Dari Tabel diatas diketahui bahwa terdapat 13 (Tiga Belas) sub kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dibawah 80,00 %, mengingat sub kegiatan tersebut merupakan lingkup sub kegiatan penunjang sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Bapenda Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2022 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2022, maka perlu dicermati kembali Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 berdasarkan pada outcome setiap program sesuai dengan Formulir Evaluasi Pada Permendagri No. 86 Tahun 2017.





Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
S.D Tahun 2023 Di Bapenda Kabupaten Purwakarta

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Keuangan

No	Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	100.00		6	7	8	9	10	11
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00							
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	100.00							
4	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100.00	100.00						
			Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana/Prasarana Kantor	100.00	100.00					
		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100.00	100.00						





No	Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun Berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1											
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterseediaan Data Kinerja OPD	100.00	100.00							
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A							
			Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	20.00								
			Persentase Peningkatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB	43.75	36.25						
7	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	Persentase Peningkatan Pendapatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB	43.76	36.26							
			Persentase Peningkatan Pendapatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB								





No	Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1										
8	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah PBB dan BPHTB	Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Non PBB dan BPHTB	43.77	36.27						
		Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Non PBB dan BPHTB	43.78	36.28						
		Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak PBB	1.19	1.19						
		Persentase Peningkatan Data PBB P2 yang Terekam	0.52	0.52						
		Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak PBB P2	2.50	2.50						
		Persentase Peningkatan Pendapatan dari sektor Pajak BPHTB	2.50	2.50						
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan PBB P2 dan BPHTB	95.00	90.00						
		Persentase Pencapaian Target PBB P2	120.00	115.00						
9	Program Intensifikasi Penagihan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Piutang Tertagih terhadap Piutang Pendapatan Daerah	30.00	15.00						





No	Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Terhapusnya Piutang Pajak Daerah kadaluwarsa	75.00	35.00						
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masalah Keberatan Pajak Daerah/Pendapatan Lainnya	95.00	95.00						
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3.50	3.50						
		Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	72.50		67.50	55.75	82.59	70.00	70.00	100.00
10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7.00		6.00	4.47	74.42	6.50	6.50	100.00





Sedangkan untuk tahun berjalan yaitu Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran mencapai sebesar Rp33.291.969.580 terdiri atas 2 Program, 9 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan, dengan estimasi capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100,00 % serta tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran. Berdasarkan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 maupun perkiraan capaian Tahun Anggaran 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bapenda Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

- a. Masih Terdapat Usulan Kegiatan yang Setelah Diinventarisasi Belum Sesuai Dengan Rencana Kegiatan yang Telah Dicanangkan Pada Renstra maupun Renja Bapenda.
- b. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Belum Didukung Dengan Ketersediaan Data-Data Yang Memadai dan Sistem Kerja Stakeholder Pendukung Secara Optimal, Sehingga Berpengaruh Terhadap Kualitas Penyusunan Hasil Kajian.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, maka pada Tahun 2024 Bapenda Kabupaten Purwakarta menyusun Strategi:

- a. Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Manajemen Kebutuhan Kantor;
- b. Menyusun Dokumen Perencanaan Peningkatan Pajak Daerah Yang Baik, Berkualitas dan Sistematis; dan
- c. Menyediakan Kebutuhan Kajian Peningkatan Pajak Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pajak Daerah Yang Akurat.

Dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pemenuhan Manajemen Kebutuhan Kantor;
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian / Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan Peningkatan Pajak Daerah; dan
- c. Menyusun Kajian-Kajian Peningkatan Pajak Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pajak Daerah.





2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta merupakan Unsur Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang, berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 251 Tahun 2021 mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan khusus yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksana tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- e. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan





bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan perencanaan, keuangan serta kepegawaian dan administrasi umum.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja di lingkungan badan;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, Barang Milik Daerah (BMD), perencanaan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Bidang Pendataan dan Pelayanan, mempunyai tugas melaksanakan Sebagian fungsi Badan di Bidang Pendataan dan Pelayanan.

Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Pelayanan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang Pendataan dan Pelayanan; dan
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Pendataan dan Pelayanan membawahkan :

- a. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
- b. Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB; dan
- c. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya.

4. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.

Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang penetapan dan pengolahan data;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di penetapan dan pengolahan data;
- c. pengelolaan administrasi di bidang penetapan dan pengolahan data;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Penetapan dan Pengolahan Data membawahkan :





- a. Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data; dan
 - c. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan.
5. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan.

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan, pengendalian dan evaluasi pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang penagihan, pengendalian dan evaluasi pelaporan;
- c. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan, pengendalian dan evaluasi pelaporan.

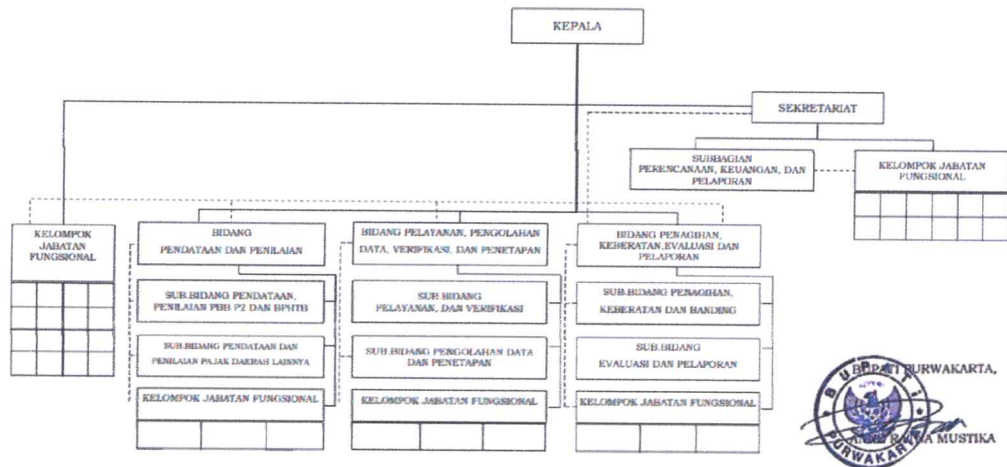
Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan membawahkan :

- a. Sub Bidang Penagihan;
- b. Sub Bidang Pengendalian Keberatan; dan
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 50 Tahun 2023:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
BAPENDA Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



Sumber: SOTK Bapenda Kabupaten Purwakarta





Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal
RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
5	02		Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan		36,812,578,527	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan				36,812,578,527
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		28,912,578,527	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				28,912,578,527
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%				Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat				





Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah					Daerah				
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Purwokarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	30,000,000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Purwokarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	30,000,000
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwokarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwokarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Purwokarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Purwokarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Purwokarta	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Purwokarta	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	15,000,000





				Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatorif (Rp)	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatorif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	
5 02 01 2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	
5 02 01 2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20,000,000	





Kode	Rancangan Awal RKPP					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20,000,000
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/Bulan	21,998,078,527	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/Bulan	21,998,078,527
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,000,000





Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
5 02 01 2.02	06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	15,000,000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	15,000,000
5 02 01 2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	15,000,000
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15,000,000
5 02 01 2.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15,000,000





Kode		Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1		2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15,000,000
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15,000,000
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20,000,000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100,000,000
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Purwakarta	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Purwakarta	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	1 Dokumen	50,000,000





				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatorif (Rp)	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatorif (Rp)			
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11			
5 02 01 2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100,000,000			
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah							
5 02 01 2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000			
5 02 01 2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	600,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	600,000,000			
5 02 01 2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15,000,000			





		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350,000,000	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	350,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	350,000,000	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6,000,000	
5 02 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	200,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	200,000,000	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000	





Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan								
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11		
5 02	01 2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	36,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	100,000,000
5 02	01 2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	100,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	100,000,000
5 02	01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5 02	01 2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300,000,000





Kode	Rancangan Awal RKPP						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatorif (Rp)	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatorif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	
5 02 01 2.07	05 Pengadaan Mebel	Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	Pengadaan Mebel	Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	
5 02 01 2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	
5 02 01 2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	
5 02 01 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000,000	





				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11			
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purwokarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purwokarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000			
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwokarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	625,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwokarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	625,000,000			
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwokarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,200,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwokarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,200,000,000			
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							





				Rancangan Awal RKPP				Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
	2	3	4					7	8	9		10	11
5	02	01	2.09	01	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27,500,000
5	02	01	2.09	02	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	200,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	200,000,000
5	02	01	2.09	06	Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	200,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	200,000,000
5	02	01	2.09	09	Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1 Unit	500,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1 Unit	500,000,000





				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (Rp)	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (Rp)			
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11			
5	02 04 2.01 03	Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Pajak Daerah, Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	200,000,000	Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Purwakarta	Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	200,000,000			
5	02 04 2.01 04	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	200,000,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	200,000,000			
5	02 04 2.02 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	400,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	400,000,000			





Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan								
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
5 02 04	2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	1 Laporan	700,000,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	1 Laporan	700,000,000
5 02 04	2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Purwakarta	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	500 Objek Pajak	200,000,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Purwakarta	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	500 Objek Pajak	200,000,000
5 02 04	2.02 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	453 Dokumen	250,000,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	453 Dokumen	250,000,000
5 02 04	2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12000 Layanan	200,000,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12000 Layanan	200,000,000
5 02 04	2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	453 Dokumen	100,000,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	453 Dokumen	100,000,000





Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1										
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	452600 Dokumen	800,000,000	Penagihan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	452600 Dokumen	800,000,000
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	300 Dokumen	100,000,000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	300 Dokumen	100,000,000
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	40 Dokumen	200,000,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	40 Dokumen	200,000,000
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	100,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	100,000,000
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi	1 Laporan	100,000,000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi	1 Laporan	100,000,000





Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
			Pemerintah Daerah					Pemerintah Daerah		





2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pelaksana Urusan pemerintahan bidang fungsi penunjang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan, khusus yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah. Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 251 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah, pada dasarnya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi.





BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam RPJMN 2020-2024 dimana terdapat **7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional** diantaranya yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaan pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah





yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.





5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.





Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu: **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**.

Adapun Isu Strategis Nasional Tahun 2023 adalah:

1. Kemiskinan;
2. Lapangan Kerja;
3. UMKM; dan
4. Industri.

Sedangkan Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Industri;
2. Pariwisata;
3. Ketahanan Pangan;
4. UMKM;
5. Infrastruktur;
6. Transformasi Digital;
7. Pembangunan Rendah Karbon;
8. Reformasi Perlindungan Sosial;
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan; dan
10. Reformasi Kesehatan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPENDA

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 yaitu: **"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"**.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal;
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah; dan
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien,





Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BAPENDA

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Bapenda Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2023 terdiri atas:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini memiliki Indikator: Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- ✚ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ✚ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

- ✚ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- ✚ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi





- ✦ Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - j) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- ✦ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan Mebel
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ✦ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✦ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Mebel
 - d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini memiliki Indikator: Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); Persentase Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- ✦ Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - a) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah





- b) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- e) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- f) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- g) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- h) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- i) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- j) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- k) Penagihan Pajak Daerah
- l) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- m) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- n) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- o) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Berikut adalah Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 di Bapenda Kabupaten Purwakarta:





TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN PURWAKARTA

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun 2024		Tahun 2025	
(3)	(4)	(5)	(6)	target	Rp	target	Rp
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	28,912,578,527.00	A Predikat	29,330,539,558.00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.00 %	96 %	125,000,000.00	98 %	125,000,000.00
5.02.012.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000.00	2 Dokumen	30,000,000.00
5.02.012.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Dokumen	1Dokumen	5,000,000.00	1Dokumen	5,000,000.00
5.02.012.0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Dokumen	1Dokumen	5,000,000.00	1Dokumen	5,000,000.00
5.02.012.0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Dokumen	1Dokumen	5,000,000.00	1Dokumen	5,000,000.00
5.02.012.0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Dokumen	1Dokumen	10,000,000.00	1Dokumen	10,000,000.00



5.02.012.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	100 Dokumen	1Dokumen	₹0,000,000.00	1Dokumen	₹0,000,000.00
5.02.012.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Laporan	1Laporan	20,000,000.00	1Laporan	20,000,000.00
5.02.012.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Laporan	1Laporan	20,000,000.00	1Laporan	20,000,000.00
5.02.012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang	3.00 Dokumen	3 Dokumen	22,048,078,527.00	3 Dokumen	22,081,039,558.00
5.02.012.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	80 Orang/bulan	21,998,073,527.00	80 Orang/bulan	22,031,039,558.00
5.02.012.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1Laporan	20,000,000.00	1Laporan	20,000,000.00
5.02.012.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	1Dokumen	₹5,000,000.00	1Dokumen	₹5,000,000.00
5.02.012.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	1Laporan	₹5,000,000.00	1Laporan	₹5,000,000.00
5.02.012.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	3.00 Dokumen	3 Dokumen	65,000,000.00	3 Dokumen	65,000,000.00
5.02.012.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1Dokumen	₹5,000,000.00	1Dokumen	₹5,000,000.00
5.02.012.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1Dokumen	₹5,000,000.00	1Dokumen	₹5,000,000.00
5.02.012.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1Laporan	₹5,000,000.00	1Laporan	₹5,000,000.00
5.02.012.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1Laporan	20,000,000.00	1Laporan	20,000,000.00





5.02.012.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawain yang Disusun	3.00 Dokumen	3 Dokumen	250,000,000.00	3 Dokumen	350,000,000.00
5.02.012.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1Paket	100,000,000.00	1Paket	200,000,000.00
5.02.012.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1Dokumen	50,000,000.00	1Dokumen	50,000,000.00
5.02.012.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34Orang	10Orang	100,000,000.00	10Orang	100,000,000.00
5.02.012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.00 Laporan	10 Laporan	1,907,000,000.00	10 Laporan	2,042,000,000.00
5.02.012.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	13Paket	1Paket	50,000,000.00	1Paket	50,000,000.00
5.02.012.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6Paket	3Paket	600,000,000.00	3Paket	600,000,000.00
5.02.012.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13Paket	1Paket	15,000,000.00	1Paket	50,000,000.00
5.02.012.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47Paket	3Paket	350,000,000.00	3Paket	350,000,000.00
5.02.012.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	28Paket	3Paket	350,000,000.00	3Paket	350,000,000.00
5.02.012.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1Dokumen	2Dokumen	6,000,000.00	2Dokumen	6,000,000.00
5.02.012.06.08	fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2Laporan	2Laporan	200,000,000.00	2Laporan	200,000,000.00
5.02.012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	62HOK Laporan	2Laporan	200,000,000.00	2Laporan	200,000,000.00
5.02.012.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2Dokumen	2Dokumen	36,000,000.00	2Dokumen	36,000,000.00
5.02.012.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2Dokumen	2Dokumen	100,000,000.00	2Dokumen	200,000,000.00





5.02.012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BM D Yang Disusun	5.00	5 Dokumen	700,000,000.00	5 Dokumen	850,000,000.00
5.02.012.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	300,000,000.00	1 Unit	300,000,000.00
5.02.012.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	200,000,000.00
5.02.012.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	200,000,000.00
5.02.012.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00
5.02.012.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00
5.02.012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan	3.00 Jasa	3 Jasa	2,840,000,000.00	3 Jasa	2,840,000,000.00
5.02.012.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	15,000,000.00
5.02.012.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	625,000,000.00	2 Laporan	625,000,000.00
5.02.012.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2,200,000,000.00	2 Laporan	2,200,000,000.00





5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			-	-		0.00	-		0.00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			-	-		0.00	-		0.00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			-						
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			-	-		3,950,000,000.00	-		4,000,000,000.00
5.02.04.2.0101	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			1Dokumen	1Dokumen		200,000,000.00	1Dokumen		250,000,000.00
5.02.04.2.0102	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			1Dokumen	1Dokumen		200,000,000.00	1Dokumen		200,000,000.00
5.02.04.2.0103	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			1Laporan	1Laporan		200,000,000.00	1Laporan		200,000,000.00
5.02.04.2.0104	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			1Unit	1Unit		200,000,000.00	1Unit		200,000,000.00
5.02.04.2.0105	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			1Laporan	1Laporan		400,000,000.00	1Laporan		400,000,000.00





5.02.04.2.0106	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	700,000,000.00	1 Laporan	700,000,000.00
5.02.04.2.0107	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	450 Objek Pajak	500 Objek Pajak	200,000,000.00	500 Objek Pajak	200,000,000.00
5.02.04.2.0108	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	452,600 Dokumen	452,600 Dokumen	250,000,000.00	452,600 Dokumen	250,000,000.00
5.02.04.2.0109	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12000 Layanan	12,000 Layanan	200,000,000.00	12,000 Layanan	200,000,000.00
5.02.04.2.0110	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	452,600 Dokumen	452,600 Dokumen	100,000,000.00	452,600 Dokumen	100,000,000.00
5.02.04.2.0111	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah	452,600 Dokumen	452,600 Dokumen	800,000,000.00	452,600 Dokumen	800,000,000.00
5.02.04.2.0112	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	250 Dokumen	300 Dokumen	100,000,000.00	300 Dokumen	100,000,000.00
5.02.04.2.0113	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	37 Dokumen	40 Dokumen	200,000,000.00	40 Dokumen	200,000,000.00
5.02.04.2.0114	Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	4 Laporan	100,000,000.00	4 Laporan	100,000,000.00
5.02.04.2.0115	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00
					32,862,578,527.00		33,330,539,558.00





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:





RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPENDA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Tahun 2024		Tahun 2025	
(3)	(4)	(5)	(6)	target	Rp	target	Rp
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	28,912,578,527.00	A Predikat	29,330,539,558.00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	94.00 %	96 %	125,000,000.00	98 %	125,000,000.00
5.02.012.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000.00	2 Dokumen	30,000,000.00
5.02.012.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Dokumen	1Dokumen	15,000,000.00	1Dokumen	15,000,000.00
5.02.012.0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Dokumen	1Dokumen	15,000,000.00	1Dokumen	15,000,000.00
5.02.012.0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Dokumen	1Dokumen	15,000,000.00	1Dokumen	15,000,000.00
5.02.012.0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	100 Dokumen	1Dokumen	10,000,000.00	1Dokumen	10,000,000.00





5.02.012.0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	100 Dokumen	1Dokumen		0,000,000.00	1Dokumen	0,000,000.00
5.02.012.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Laporan	1Laporan		20,000,000.00	1Laporan	20,000,000.00
5.02.012.0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Laporan	1Laporan		20,000,000.00	1Laporan	20,000,000.00
5.02.012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang	3,00 Dokumen	3 Dokumen	22,048,078,527.00	3 Dokumen	3 Dokumen	22,081,039,558.00
5.02.012.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	80 Orang/bulan	21,998,078,527.00	80 Orang/bulan	22,031,039,558.00	
5.02.012.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1Laporan	20,000,000.00	1Laporan	20,000,000.00	
5.02.012.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	1Dokumen	5,000,000.00	1Dokumen	5,000,000.00	
5.02.012.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1Laporan	5,000,000.00	1Laporan	5,000,000.00	
5.02.012.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	3,00 Dokumen	3 Dokumen	65,000,000.00	3 Dokumen	3 Dokumen	65,000,000.00
5.02.012.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1Dokumen	5,000,000.00	1Dokumen	5,000,000.00	
5.02.012.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1Dokumen	5,000,000.00	1Dokumen	5,000,000.00	
5.02.012.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1Laporan	5,000,000.00	1Laporan	5,000,000.00	
5.02.012.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1Laporan	20,000,000.00	1Laporan	20,000,000.00	





5.02.012.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawain Yang Disusun	3.00 Dokumen	3 Dokumen	250,000,000.00	3 Dokumen	350,000,000.00
5.02.012.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	100,000,000.00	1 Paket	200,000,000.00
5.02.012.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1Dokumen	50,000,000.00	1Dokumen	50,000,000.00
5.02.012.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	34 Orang	10 Orang	100,000,000.00	10 Orang	100,000,000.00
5.02.012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.00 Laporan	10 Laporan	1,907,000,000.00	10 Laporan	2,042,000,000.00
5.02.012.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	13 Paket	1 Paket	50,000,000.00	1 Paket	50,000,000.00
5.02.012.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	600,000,000.00	3 Paket	600,000,000.00
5.02.012.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	1 Paket	5,000,000.00	1 Paket	50,000,000.00
5.02.012.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	3 Paket	350,000,000.00	3 Paket	350,000,000.00
5.02.012.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	28 Paket	3 Paket	350,000,000.00	3 Paket	350,000,000.00
5.02.012.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1Dokumen	2Dokumen	6,000,000.00	2Dokumen	6,000,000.00
5.02.012.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	200,000,000.00	2 Laporan	200,000,000.00
5.02.012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	152 HOK Laporan	2 Laporan	200,000,000.00	2 Laporan	200,000,000.00
5.02.012.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2Dokumen	2Dokumen	36,000,000.00	2Dokumen	36,000,000.00
5.02.012.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2Dokumen	2Dokumen	100,000,000.00	2Dokumen	200,000,000.00





5.02.012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Yang Disusun	5,00 Dokumen	5 Dokumen	700,000,000.00	5 Dokumen	850,000,000.00
5.02.012.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1Unit	300,000,000.00	1Unit	300,000,000.00
5.02.012.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	1Unit	200,000,000.00	1Unit	200,000,000.00
5.02.012.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1Unit	50,000,000.00	1Unit	200,000,000.00
5.02.012.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1Unit	50,000,000.00	1Unit	50,000,000.00
5.02.012.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1Unit	100,000,000.00	1Unit	100,000,000.00
5.02.012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan	3,00 Jasa	3 Jasa	2,840,000,000.00	3 Jasa	2,840,000,000.00
5.02.012.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	1Laporan	5,000,000.00	1Laporan	5,000,000.00
5.02.012.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	625,000,000.00	12 Laporan	625,000,000.00
5.02.012.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,200,000,000.00	12 Laporan	2,200,000,000.00





5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			-	-		0.00	-		0.00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			-	-		0.00	-		0.00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			-	0.83 Persentase	3,950,000,000.00	0.00	0.88 Persentase	4,000,000,000.00	0.00
				-	12.65 Persentase	0.00	0.00	13.00 Persentase	0.00	0.00
				-	49.84 Persentase	0.00	0.00	50.34 Persentase	0.00	0.00
				-	4.53 Persentase	0.00	0.00	4.84 Persentase	0.00	0.00
				-	88.95 Persentase	0.00	0.00	89.40 Persentase	0.00	0.00
				-	9.50 Persentase	0.00	0.00	10.00 Persentase	0.00	0.00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			-	-	3,950,000,000.00	0.00	-	4,000,000,000.00	0.00
5.02.04.2.0101	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			1Dokumen	1Dokumen	200,000,000.00	0.00	1Dokumen	250,000,000.00	0.00
5.02.04.2.0102	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			1Dokumen	1Dokumen	200,000,000.00	0.00	1Dokumen	200,000,000.00	0.00
5.02.04.2.0103	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			1Laporan	1Laporan	200,000,000.00	0.00	1Laporan	200,000,000.00	0.00
5.02.04.2.0104	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			1Unit	1Unit	200,000,000.00	0.00	1Unit	200,000,000.00	0.00
5.02.04.2.0105	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			1Laporan	1Laporan	400,000,000.00	0.00	1Laporan	400,000,000.00	0.00





5.02.04.2.0106	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1Laporan	1Laporan	700,000,000.00	1Laporan	700,000,000.00
5.02.04.2.0107	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	450 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	200,000,000.00	500 Obyek Pajak	200,000,000.00
5.02.04.2.0108	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	452600 Dokumen	452.600 Dokumen	250,000,000.00	452.600 Dokumen	250,000,000.00
5.02.04.2.0109	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12000 Layanan	12.000 Layanan	200,000,000.00	12.000 Layanan	200,000,000.00
5.02.04.2.0110	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	452600 Dokumen	452.600 Dokumen	100,000,000.00	452.600 Dokumen	100,000,000.00
5.02.04.2.0111	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	452600 Dokumen	452.600 Dokumen	800,000,000.00	452.600 Dokumen	800,000,000.00
5.02.04.2.0112	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	250 Dokumen	300 Dokumen	100,000,000.00	300 Dokumen	100,000,000.00
5.02.04.2.0113	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	37 Dokumen	40 Dokumen	200,000,000.00	40 Dokumen	200,000,000.00
5.02.04.2.0114	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	4 Laporan	100,000,000.00	4 Laporan	100,000,000.00
5.02.04.2.0115	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	1Laporan	100,000,000.00	1Laporan	100,000,000.00
					32,862,578,527.00		33,330,539,558.00





BAB V PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini memuat Tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi, Program dan Usulan Kegiatan Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Renja Bapenda Kabupaten Purwakarta selain menjadi Acuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bapenda. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bapenda Kabupaten Purwakarta. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen beserta seluruh staff Bapenda Kabupaten Purwakarta sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Semoga Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

Purwakarta, Juli 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**


Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001

